

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis bahas mengenai kebijakan pengalokasian bantuan dana kampung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kampung kapeso. Penulis menyimpulkan poin penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini.

1. Kebijakan alokasi dana kampung pada pemerintahan kampung dikampung kapeso telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penyalurannya Kepala Kampung dan Perangkatnya bermusyawarah dengan masyarakat, kemudian dalam penggunaannya diutamakan pada kebutuhan-kebutuhan primer seperti honor panitia pelaksana kegiatan, tunjangan pegawai kampung, biaya operasional BPD, Penguatan kelembagaan LPM, Penguatan Kelembagaan PKK, dan Pemuda/pemudi. Jika memungkinkan atau memiliki kelebihan dari ADK tersebut diperuntukan pada kebutuhan sekunder yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti subsidi dan bantuan modal di sektor mikro, pembangunan proyek-proyek fasilitas umum yang mempermudah urusan masyarakat dan memperlancar kegiatan ekonomi, serta pembangunan proyek-proyek lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat/
2. Pihak pemerintah kampung dalam pelaporan dana yang diterima dari pemerintah pusat bersikap transparan dan menempelkan pengalokasian dana dalam masa satu tahun ditempat-tempat yang bisa diketahui

oleh masyarakat. Disamping itu kesiapan aparat kampung ketika mendapat pengalaman baru masih membutuhkan waktu untuk belajar dan mempersiapkan diri dalam mengembang tugas, komunikasi yang terbatas antara pemerintah kampung dengan pemerintah kabupaten yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perencanaan kampung.

3. Pengaturan Alokasi Dana Kampung sangat relevan, hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada bahwa pengalokasian dana lebih diutamakan pada kebutuhan primer, jika memiliki kelebihan maka dana tersebut dipergunakan pada kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier.

B. SARAN

Saran- saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu :

1. Dari pembahasan mengenai kebijakan dana kampung, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam pelaksanaannya. Disamping itu, masyarakat dapat mengetahui tentang sumber dana dan pemanfaatan anggaran yang didapat. Anggaran yang didapat di kampung bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk kampung paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).
2. Peningkatan kualitas dari aparat kampung harus diutamakan, agar memiliki kesiapan ketika mendapati hal-hal baru terkait dengan perencanaan pembangunan kampung, hal tersebut dimaksudkan dengan kegiatan-kegiatan sudah direncanakan melalui hasil musyawarah dapat

terlaksana dengan dengan baik sesuai yang diharapkan. Komunikasi antara pemerintah kampung dengan pemerintah pusat lebih ditingkatkan lagi, agar dana dari pemerintah pusat turun tepat waktu dan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, terlaksana tepat waktu.